

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan termasuk di dalamnya komunitas tunarungu, kehidupan modern ditandai oleh sifat suka belajar (*studious*) dan suka bekerja (*industrious*), karena kedua sifat inilah yang dalam perwujudannya membuat manusia tidak henti-hentinya berusaha untuk menciptakan perubahan yang ditujukan pada perbaikan mutu kehidupan dan taraf kesejahteraannya. Dalam kenyataannya manusia modern tidak pernah puas dengan keberadaannya sebagai suatu kondisi final. Setiap keadaan dihayatinya sebagai status quo untuk melangkah lebih lanjut dengan tindakan dan prakarsa guna mengubah kondisi kehadirannya dalam ke-disini-an dan ke-kini-an belaka. Maka benarlah ungkapan yang menegaskan, bahwa manusia adalah makhluk yang terus menerus melampaui keadannya 'disini dan kini' (*transcends the here and now*), yang biasa diartikan juga melampaui apa yang nyata menuju pada apa yang mungkin. Dalam bahasa yang lebih disederhanakan manusia terus menerus memproyeksikan dirinya kemasa depan.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia seutuhnya, yaitu “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3 UU No. 20 2003). Akan tetapi, tujuan tersebut terkendala dengan beberapa permasalahan pendidikan nasional yang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol, diantaranya: (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan.

Di sisi lain, Waini Rasyidin (2000:5) memaparkan ketimpangan system pendidikan nasional, menurutnya pendidikan dan pengajaran nasional di SD/MI, SLTP, dan SM, plus PLS secara makro (di luar Perguruan Tinggi) tampaknya rata-rata hanya meluluskan: (1) sejumlah besar calon tenaga kerja muda tak terampil dan relative belum siap kerja; (2) manusia Indonesia yang berpengathuan tetapi kurang sadar nilai; (3) tenaga kerja terampil yang jumlahnya terbatas dalam masyarakat yang dilanda krisis dan dililit utang luar negeri.

Di samping itu, sejak awal masa krisis hingga tahun 2000, hampir seluruh sumber daya dan upaya pembangunan pendidikan terkonsentrasi pada penanganan permasalahan jangka pendek, melalui program-program bantuan untuk kelompok masyarakat miskin yang paling menderita akibat krisis, misalnya mengatasi putus sekolah, menyediakan makanan bergizi, membantu biaya pendidikan melalui pemberian beasiswa agar mereka dapat memasuki sekolah atau melanjutkan pendidikan, melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pembangunan pendidikan pasca krisis yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengimplementasikan kembali program-program pembentukan SDM yang bermutu, dan profesional sebagai pelaku

pembangunan baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Beberapa permasalahan di atas, melahirkan tiga tantangan besar bagi dunia pendidikan Indonesia. *Pertama*, akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut agar dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah sebagai berikut: *Pertama*, PLS belum mendapat pemahaman dan perhatian yang profesional dari pemerintah maupun masyarakat dalam sistem pembangunan nasional, baik yang berkenaan dengan peraturan perundangan maupun dukungan anggaran sehingga pemerataan pelayanan PLS bagi masyarakat di berbagai lapisan dan di berbagai daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. *Kedua*, masih terbatasnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada institusi PLS di tingkat pusat dan daerah dalam mengelola, mengembangkan, dan melembagakan PLS. *Ketiga*, masih terbatasnya sarana dan prasarana PLS baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran

PLS dalam rangka memperluas kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi hasil program PLS dengan kebutuhan pembangunan. *Keempat*, terselenggaranya kegiatan PLS di lapangan tergantung pada tenaga sukarela yang tidak ada kaitan struktural dengan pemerintah sehingga tidak ada jaminan kesinambungan pelaksanaan program PLS. *Kelima*, partisipasi/peran serta masyarakat dalam memprakarsai penyelenggaraan dan pelebagaan PLS masih relatif sangat rendah.

Dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan PLS, menurut Ditjen PLS (2003) tantangan pembangunan PLS untuk kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

(1) *Pemerataan*. Meskipun pemerintah sejak tahun 1986 telah melaksanakan Wajib Belajar Sekolah Dasar 6 tahun dan tahun 1994 ditingkatkan menjadi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, akan tetapi hingga dewasa ini belum semua anak usia wajar dapat tertampung di sekolah. (2) *Mutu dan Relevansi*; Pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. (3) *Efisiensi*; Efisiensi erat kaitannya dengan penyediaan anggaran yang wajar.

Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya pikir, daya kalbu dan daya fisik peserta didik sehingga yang bersangkutan memiliki lebih banyak pilihan dalam kehidupan, baik pilihan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, pilihan kesempatan untuk bekerja, maupun pilihan untuk mengembangkan dirinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, PLS perlu memberikan bekal dasar kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan kepada peserta didik agar mereka siap menghadapi berbagai kehidupan nyata. Upaya-upaya tersebut bukan tidak berhasil sama sekali dalam meningkatkan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan hidup tamatannya, akan tetapi

kehidupan nyata menuntut PLS untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. PLS dituntut menghasilkan tamatan yang mampu, sanggup, dan terampil untuk menghadapi tantangan hidup yang sarat kompetisi dan kolaborasi sekaligus. Upaya PLS adalah mendekatkan pendidikan dengan kehidupan nyata yang memiliki nilai-nilai preservatif dan progresif sekaligus melalui pengintensifan dan pengefektifan pendidikan kecakapan hidup. Kecakapan hidup sudah diajarkan, akan tetapi perlu peningkatan intensitas dan efektivitasnya, sehingga PLS dapat menghasilkan tamatan yang mampu, sanggup, dan terampil terjun dalam kehidupan nyata nantinya.

Kemandirian merupakan faktor utama dalam sebuah pencapaian pendidikan. Hasil penelitian McKinnon dan Renner (1971) serta Schewbel (1975) yang dikutip Konstance Kamii (Kaswardi, 1993:65) menyampaikan bahwa para siswa sekolah menengah sebelumnya tidak berpikir logis dan kalau seorang mahasiswa tersebut tidak mampu berpikir logis pada taraf formal-operasional, tentu saja ia tidak dapat berpikir kritis dan mandiri.

Soemantri Brodjonegoro (Fasli Jalal, 2001:369), menyatakan bahwa “salah satu kritik yang ditujukan kepada dunia pendidikan nasional adalah sistem dan proses pendidikannya kurang memperhatikan pembentukan kepribadian yang mandiri, kreatif, inovatif, dan demokratis”. Namun demikian, kenyataan menunjukkan pendidikan di Indonesia belum dapat beranjak dari persoalan klasik tersebut, sehingga keadaan lama tetap berjalan sebagaimana biasanya.

Pernyataan Sanusi (1998:561) menguatkan mengenai kemandirian, dinyatakan bahwa “aktif belajar mandiri dan aktif berpikir mandiri sebagai kegiatan

essensial siswa masih jauh dari tercapai dan siswa masih belajar di bawah potensinya.” Hal ini menunjukkan bahwa salah satu persoalan krisis dalam dunia pendidikan adalah belum mampunya sekolah memberikan bekal yang memadai bagi peserta didik untuk dapat bekerja dan sekaligus meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Secara lebih spesifik mengenai peran pendidikan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Unesco (2000) menegaskan: Pendidikan yang memainkan peranan fundamental untuk pembangunan pribadi dan sosial telah dimanfaatkan untuk menciptakan angkatan kerja yang lebih terampil, tetapi sering atas pengorbanan pembangunan seluruh pribadi. Tujuan-tujuan jangka panjang dari nilai-nilai manusia dan prinsip-prinsip moral cenderung menjadi kurang penting pada waktu mereka harus bersaing dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang bersifat lebih segera. Selanjutnya, apakah negara industri atau negara yang sedang mengalami proses industrialisasi, banyak negara di kawasan ini yang masih didalam proses demokratisasi dan menuntut usaha yang sungguh-sungguh dalam penyebarluasan prinsip-prinsip nilai-nilai yang universal, seperti hak-hak asasi manusia untuk semua dan dalam promosi kebudayaan, perdamaian dan toleransi. Untuk tujuan ini, pendidikan untuk perdamaian hak-hak asasi manusia dan demokrasi (yaitu pendidikan internasional dan nilai-nilai) hendaklah memperoleh perhatian dan prioritas yang lebih besar.

Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) diisukan dalam pengembangan layanan pendidikan dewasa ini, pengayaan proses Inklusi

dalam tatanan Pendidikan Luar Biasa mengedepankan persamaan hak mendapatkan pendidikan untuk semua orang tanpa melihat perbedaan individu (education for all). Pernyataan di atas membuktikan bahwa sistem pendidikan, baik formal maupun pendidikan luar sekolah (non formal education) diperlukan dalam pembelajaran setiap orang untuk menempuh kemandirian.

Kerja sama lintas sektoral pada berbagai level akan sangat penting yaitu tentang pentingnya pendidikan untuk semua individu yang diselenggarakan di bawah naungan departemen pendidikan. Ini tidak menutup kemungkinan bantuan dari departemen-departemen lain, seperti departemen kesehatan dan departemen sosial dalam memberikan dukungan yang diperlukan. Begitu juga dengan departemen tenaga kerja jika diperlukan harus dapat membantu dalam semua masalah yang berhubungan dengan pekerjaan.

Penelitian ini membahas perspektif pengayaan, sebuah pendekatan alternatif bagi model pendidikan kebutuhan khusus yang berorientasi *pedagogis diagnostic-rehabilitatif*, yang dibangun atas dasar assesmen terhadap apa yang dapat dilakukan oleh orang serta apa yang dapat dilakukan oleh sekolah dan masyarakat, pendekatan sistem inklusif belum menyentuh kepada substansi pembelajaran yang menciptakan out come warga belajar di lingkungan pendidikan komunitas tunarungu sebagai komponen masyarakat berkebutuhan khusus, setelah tamat di sekolah formal, para orang tua sering dikeluhkan karena kembali berfikir mencari peluang kerja putra-putrinya.

Kesejahteraan sosial di Jawa Barat juga di dalamnya memiliki masyarakat

yang beragam, yang normal dan ada juga yang kurang beruntung/cacat, lembaga pendidikan di kota Bandung sudah banyak yang peduli terhadap mereka yang cacat, akan tetapi baru pada tingkat mempersiapkan mereka dalam pembekalan kehidupan untuk mewujudkan produktifitas penyandang cacat. Masih sedikit yang berfikir atau peduli terhadap kelangsungan persaingan dalam menjual produk atau jasa yang telah dimilikinya di masyarakat.

Sampai sejauh ini, di Indonesia belum dikembangkan model pelatihan atau model pembelajaran kewirausahaan pada masyarakat berkebutuhan khusus (cacat) yang sesuai dengan kebutuhannya atau model pelatihan kewirausahaan pada komunitas tunarungu misalnya. Pelatihan yang diselenggarakan menciptakan produk atau jasa yang dimiliki mereka yang cacat, di Indonesia masih menggunakan pendekatan konvensional dan tidak terstruktur, lebih menekankan kepada pencapaian tujuan lembaga penyelenggara pelatihan dan kurang memperhitungkan tujuan dan kebutuhan peserta pelatihan masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Yayasan Panti Guna Tunas Kasih adalah salah satu yayasan atau panti sosial yang bergerak untuk berperan serta dalam pengembangan dan peningkatan kualitas komunitas anak tuna rungu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Yayasan Panti Guna Tunas Kasih berdiri pada tahun 1977 yang sebelumnya sudah mempunyai wadah meskipun sangat sederhana. Yayasan ini berada di Kabupaten Sumedang. Yayasan Panti Guna Tunas Kasih mempunyai akte pendirian pada tanggal 10 Maret 1977 dengan akte notaries Koswara, SH, no.25 Bandung. Yayasan tersebut menyelenggarakan dan berusaha membantu, mendidik

dan menolong penyandang cacat (anak luar biasa) dalam daerah Kabupaten Sumedang dan mendapatkan ijin untuk membangun asrama/panti untuk menampung penyandang cacat berupa panti sosial yang berkedudukan di kampung Margamukti, Desa Licin Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Sumedang maupun yang datang dari luar Kabupaten Sumedang secara jasmaniah maupun rohaniah memiliki cacat yang perlu perhatian dalam penanganannya karena mereka warga Negara Indonesia yang termasuk warga Negara yang kurang beruntung. Sebagai warga Negara Indonesia yang menjunjung tinggi falsafah Pancasila dan Undang-Undang 45 terdorong pula oleh rasa pengabdian terhadap bangsa dan negara serta kepedulian sosial maka perlu adanya usaha dan kegiatan yang nyata dalam memberikan dan menolong komunitas tersebut, hingga kelak mereka dapat turut serta dalam pengabdian dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil studi eksplorasi di lapangan (kajian empiris), dan kajian teoritis (studi kepustakaan), permasalahan yang dapat teridentifikasi antara lain:

1. Pemberdayaan melalui pelatihan kewirausahaan masih belum memberikan kesempatan yang sama kepada para penyandang cacat agar bersama-sama berdampingan dalam satu kelompok dengan warga belajar normal, meskipun secara potensial tingkat kecacatan yang disandang warga belajar tidak merupakan hambatan.

2. Para penyandang cacat, khususnya komunitas tunarungu masih selalu dipandang sebagai orang-orang yang memerlukan perhatian khusus seperti memiliki tanggung jawab yang berbeda dan kebutuhan yang selalu disamakan. Padahal dalam masyarakat justru sebaliknya, yaitu para penyandang cacat juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan orang yang normal dan kebutuhannya juga akan selalu berbeda.
3. Kesenjangan kecakapan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga belajar yang normal dengan yang tidak normal menjadi masalah yang harus dijumpai dan dicari solusinya dengan cara meningkatkan program pelatihan kewirausahaan kriyakeramik .
4. Model pelatihan kreativitas pada bidang kriyakeramik masih belum banyak dilaksanakan, bahkan bagi sebagian orang, pelatihan dengan pendekatan kreativitas masih dianggap sesuatu yang tidak memungkinkan, karena para golongan penyandang cacat masih dianggap sebagai kaum yang lemah.
5. Dalam praktek pembinaan pasca pelatihan, baik yang telah diberikan kepada kelompok orang-orang normal maupun penyandang cacat belum tampak adanya usaha-usaha pembinaan yang mengarah kepada terjadinya pengembangan potensi keterampilan kriyakeramik . Bahkan banyak diantara lulusan pelatihan yang tidak berbuat apa-apa setelah selesai mengikuti pelatihan. Kalaupun ada yang telah menjalankan usaha, namun kemampuan yang telah dimiliki tersebut belum sampai pada tataran pengembangan, seperti menularkannya kepada orang lain maupun menambahnya kepada jenis usaha lain.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang dapat memberikan manfaat baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis berupa proposisi, prinsip atau dalil dalam bidang pendidikan luar sekolah, khususnya berkenaan dengan pembelajaran kewirausahaan kriyakeramik pada masyarakat berkebutuhan khusus tunarungu.

C. Perumusan Masalah

Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah model program pelatihan kewirausahaan kriyakeramik bagi warga belajar tunarungu dalam upaya memperoleh kecakapan hidup?

Masalah penelitian tersebut akan dibatasi dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana model program pelatihan kewirausahaan kriyakeramik bagi warga belajar tunarungu dalam upaya memperoleh kecakapan hidup di Yayasan Panti Guna Tuna Kasih (YPGTK) Kabupaten Sumedang saat ini?
2. Bagaimana pengembangan model konseptual program pelatihan kewirausahaan kriyakeramik bagi warga belajar tunarungu dalam upaya memperoleh kecakapan hidup di Yayasan Panti Guna Tuna Kasih (YPGTK) Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana implementasi model program pelatihan kewirausahaan kriyakeramik bagi warga belajar tunarungu dalam upaya memperoleh kecakapan hidup di Yayasan Panti Guna Tuna Kasih (YPGTK) Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana model program pelatihan kewirausahaan kriyakeramik bagi warga

belajar tunarungu dalam upaya memperoleh kecakapan hidup di Yayasan Panti Guna Tuna Kasih (YPGTK) Kabupaten Sumedang yang direkomendasikan?

D. Definisi Oprasional

Untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap penelitian yang dilakukan, maka penulis anahsis secara siiigkat beberapa istilah yang ada dalam variable judul dan fokus dalam pertanyaan penelitian ini;

1. Model

Model secara leksikal bermakna: 1) pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (KBBI, 1998: 589). Secara konteks, model berarti sebuah pola yang akan menjadi acuan dalam perancangan atau pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan arti model tersebut, maka yang dimaksud dengan model pelatihan kewirausahaan kriyakeramik adalah pola pelatihan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pelatihan kriyakeramik .

2. Program

Program secara makna leksikal adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dsb) yang akan dijalankan (KBBI, 1998: 703). Dengan demikian, maka program pelatihan adalah rancangan mengenai asas-asas pelatihan yang akan diterapkan atau dilaksanakan.

3. Pelatihan

Pelatihan dalam penelitian ini mengadop apa yang dikemukakan Tall & Hall (1998), menyimpulkan hasil studinya bahwa dengan mengkombinasikan berbagai

macam factor seperti teknik pelatihan yang benar, persiapan dan perencanaan yang matang, serta komitmen yang tinggi terhadap esensi pelatihan; organisasi (Yayasan) dapat mencapai *a greater competitive advantage* didalam pasar yang sangat ketat.

Sekalipun demikian perlu diketahui bahwa pelatihan bagi peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sering mengalami berbagai masalah atau kendala internal yang berkaitan dengan problem perseptual, komunitas tunarungu menurut pendapat penulis mengalami hal semacam ini sehingga perlu diadakan studi dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan kearah kemandiriannya.

4. Kewirausahaan

Melibatkan dua unsur pokok (1) peluang dan (2) kemampuan menanggapi peluang, berdasarkan ini maka batasan kewirausahaan berkaitan penelitian ini adalah; tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat tindakan serta membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif dan inovatif. (Pekerti 1997). Sejalan dengan. pendapat di atas, Salim Siagian (1999) mendefinisikan : "Kewirausahaan adalah semangat, perilaku dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan/masyarakat, dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien, melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas dan inovasi serta kemampuan manajemen".

Ini berarti mencakup esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif

terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat, cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. Pengertian ini juga menampung wirausaha yang pengusaha, yang mengejar keuntungan secara etis serta wirausaha yang bukan pengusaha, termasuk yang mengelola nirlaba yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan/masyarakat.

5. Kriyakeramik

Yang dimaksud kriyakeramik disini menurut Yardini Yumarta dkk dalam buku Pendidikan Keterampilan Keramik untuk SMTA adalah ragam benda yang dibuat dari tanah liat, setelah kering kemudian dibakar hingga pijar sampai suhu pembakaran tertentu setelah itu didinginkan sampai mengeras.

Pada hakekatnya keramik merupakan benda pakai namun kini merupakan ungkapan bebas (ekspresif) artinya, keramik meningkat menjadi benda seni, hal ini tidak berarti hilang segi fungsinya. Pada saat ini dapat dilihat banyak benda hasil pekerjaan tangan dari keramik yang berbentuk indah, tidak lagi disimpan semata karena benda ini akan dipakai, melainkan karena penghargaan terhadap nilai seninya atau bentuk estetikanya. Menurut golongannya, keramik dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu: keramik bakaran rendah (gerabah lunak) dan keramik bakaran tinggi (gerabah keras).

6. Komunitas Tunarungu

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa tunarungu adalah suatu istilah

umum yang menunjukkan kesulitan mendengar, yang meliputi keseluruhan kesulitan untuk mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan kedalam bagian tuli dan kurang dengar.

Kondisi para tunarungu memiliki karakter yang unik, sehingga seseorang tidak bisa menggunakan pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak. pada segi kehidupan lain yang lebih kompleks yang menyangkut sosialisasi.

7. Kecakapan Hidup

Kecakapan hidup dalam konteks prinsip-prinsip kemandirian, kerja sama, keterbukaan, akuntabilitas yang harus dikembangkan pada dunia Pendidikan Luar Biasa, khususnya komunitas tunarungu, manajemen di layanan pendidikan Berkebutuhan Khusus dengan pelayanan khususnya harus membangun kesamaan pemahaman tentang Pendidikan Berbasis Kecakapan Hidup kemudian secara bersama menyusun program pelaksanaannya, diteruskan dengan melaksanakan secara terbuka dan dievaluasi secara periodik untuk menemukan kendala dan pemecahannya.

Dalam bidang manajemen tersebut, rintisan unit produksi perlu dikembangkan, bukan sekedar sebagai unit pencari dana, tetapi lebih dari itu sebagai pemicu berkembangnya iklim wiraswasta. Kerja sama dengan instansi atau unit usaha lain sebagai pembelajaran para pengelola unit produksi agar sinergi dengan pengusaha lain.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan atau membuat model baru pelatihan kewirausahaan kriyakeramik bagi warga belajar tunarungu dalam upaya memperoleh kecakapan hidup di Yayasan Panti Guna Tuna Kasih (YPGTK) Kabupaten Sumedang. Atas dasar tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang:

- a. Model program pelatihan kewirausahaan kriyakeramik bagi warga belajar tunarungu dalam upaya memperoleh kecakapan hidup di Yayasan Panti Guna Tuna Kasih (YPGTK) Kabupaten Sumedang saat ini.
- b. Pengembangan model konseptual program pelatihan kewirausahaan kriyakeramik bagi warga belajar tunarungu dalam upaya memperoleh kecakapan hidup di Yayasan Panti Guna Tuna Kasih (YPGTK) Kabupaten Sumedang.
- c. Implementasi model program pelatihan kewirausahaan kriyakeramik bagi warga belajar tunarungu dalam upaya memperoleh kecakapan hidup di Yayasan Panti Guna Tuna Kasih (YPGTK) Kabupaten Sumedang.
- d. Model program pelatihan kewirausahaan kriyakeramik bagi warga belajar tunarungu dalam upaya memperoleh kecakapan hidup di Yayasan Panti Guna Tuna Kasih (YPGTK) Kabupaten Sumedang yang direkomendasikan.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a. Memberikan sumbangan proposisi prinsip atau dalil dalam pendidikan luar sekolah, khususnya dalam bidang pembelajaran kewirausahaan kriyakeramik masyarakat berkebutuhan khusus.
- b. Memberikan sumbangan model pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus melalui pembelajaran kewirausahaan.
- c. Memberikan sumbangan konsep dalam pelatihan untuk pengembangan kecakapan hidup komunitas tunarungu yang baru berkembang sejalan dengan aplikasi teknologi kewirausahaan yang mutakhir dalam pelbagai bidang kehidupan, khususnya aplikasi dalam proses pendistribusian barang atau jasa yang berpengaruh dan mendorong perkembangan nilai-nilai kehidupan sosial yang multikultural dalam negara yang pluralistic seperti Indonesia.

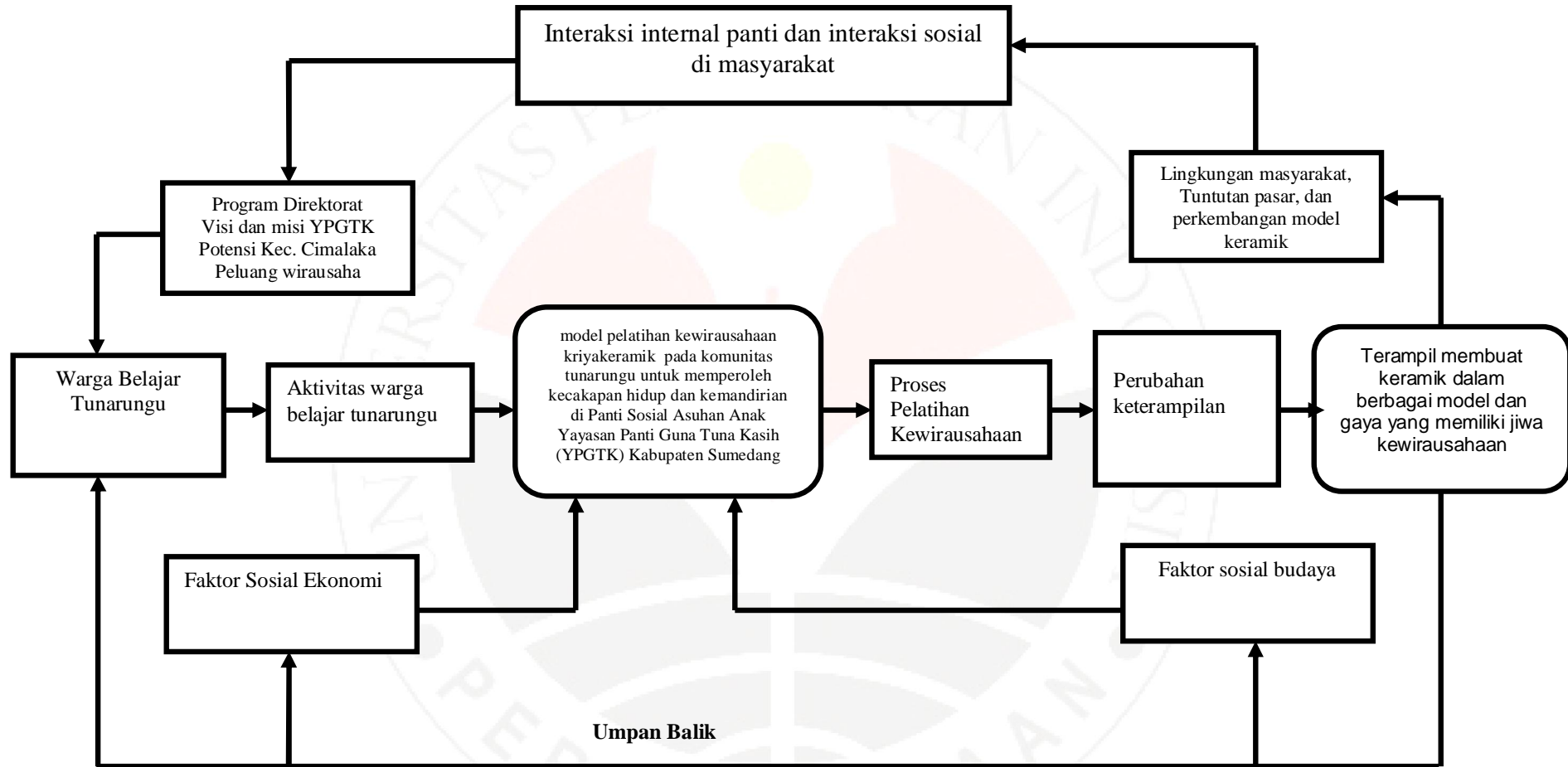
b) Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus yang diamanatkan oleh Undang-undang.
- b. Diharapkan temuan penelitian inipun memberikan masukan bagi departemen pendidikan nasional untuk mempertimbangkan implementasi pelatihan kecakapan hidup pada masyarakat berkebutuhan khusus yang dikembangkan

melalui jalur pendidikan luar sekolah yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan masa depan.

- c. Memberikan masukan bagi lembaga-lembaga dunia pendidikan khusus yang memikul kewajiban untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan masyarakat berkebutuhan khusus, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

Dari pemikiran di atas, model program pelatihan kewirausahaan kriyakeramik bagi warga belajar tunarungu dalam upaya memperoleh kecakapan hidup di Yayasan Panti Guna Tuna Kasih (YPGTK) Kabupaten Sumedang diimplementasikan setelah melalui tahapan pengembangan dengan mengadakan kajian terhadap konsep dari teori (*Theoretical Model*), kajian terhadap kondisi lapangan (*Empirical Model*) serta validasi dari pakar dan praktisi yang kompeten dalam pendidikan luar sekolah. Kerangka pemikiran tersebut dapat divisualisasikan seperti gambar pada halaman berikut.



Gambar 1.1
Paradigma Penelitian
Adaptasi dari Engking Soewarman Hasan (2001 : 34)

